

**ORIENTASI POLITIK MASYARAKAT ETNIS TIONGHOA KOTA
PONTIANAK DALAM PENGUATAN KOMITMEN KEBANGSAAN
(Studi Kasus di Masyarakat Etnis Tionghoa Kota Pontianak Kalimantan Barat)**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat
Memperoleh Gelar Magister Pendidikan
Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan**



**Disusun Oleh :
DADA SUHAIDA
NIM. 0808777**

**SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
2010**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kehidupan manusia didalam bermasyarakat memiliki peranan penting dalam sistem politik suatu negara. Manusia dalam kedudukannya sebagai makhluk sosial senantiasa akan berinteraksi dengan manusia lainnya dalam upaya menunjukkan kebutuhan hidupnya. Setiap warga negara dalam kesehariannya hampir selalu bersentuhan dengan aspek-aspek politik baik yang bersimbol maupun tidak. Kehidupan politik yang merupakan bagian dari keseharian dalam interaksi antar warga negara dengan pemerintah, dan intusi-intusi di luar pemerintahan (*non-formal*), dan telah menghasilkan dan membentuk variasi pendapat, pandangan dan pengetahuan tentang praktek-praktek perilaku politik dalam semua sistem politik. Aristoteles 384-322 SM mengatakan bahwa “*man is by nature a political animal*”, atau yang lazim disebut dengan *zoon politicon*. Aristoteles mengatakan bahwa manusia itu makhluk sosial tidak hanya bermaksud menegaskan ide tentang kewajiban manusia untuk bersosialisasi dengan sesamanya, melainkan ide tentang makhluk sosial terutama bermaksud menunjuk langsung pada kesempurnaan identitas dan jati diri manusia. Mengapa demikian? sosialitas adalah kodrat manusia. Manusia tidak bisa hidup sendirian. Manusia memerlukan manusia lain. Secara kodrati, manusia adalah makhluk yang memiliki

kecenderungan untuk hidup dalam kebersamaan dengan yang lain untuk belajar hidup sebagai manusia.

Sebagaimana Almond dan Verba (2009:16), mendefinisikan budaya politik sebagai suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada di dalam sistem itu. Dengan kata lain bagaimana distribusi pola-pola orientasi khusus menuju tujuan di antara bangsa itu. Lebih jauh mereka menyatakan bahwa warga negara senantiasa mengidentifikasi diri mereka dengan simbol-simbol dan lembaga kenegaraan berdasarkan orientasi yang mereka miliki.

Berkaitan dengan hal diatas dapat diartikan setiap berbicara budaya politik maka tidak akan lepas dari pembicaraan sistem politik, hal-hal yang di orientasikan dalam sistem politik, yaitu setiap komponen-komponen yang terdiri dari komponen-komponen struktur dan fungsi dalam sistem politik. Seseorang akan memiliki orientasi yang berbeda terhadap sistem politik dengan melihat fokus yang di orientasikan, apakah dalam tatanan struktur politik struktur dari fungsi politik atau gabungan dari keduanya. Contohnya orientasi politik terhadap lembaga politik, politik terhadap lembaga legislatif, eksekutif dan sebagainya. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara keanekaragaman memerlukan suatu perekat agar bangsa yang bersangkutan dapat bersatu guna memelihara keutuhan negerinya.

Suatu bangsa dalam menyelenggarakan kehidupannya tidak terlepas dari pengaruh lingkungannya, yang didasarkan atas hubungan timbal balik atau kait-mengait antara filosofi bangsa, idiologi, aspirasi, dan cita-cita yang dihadapkan pada

kondisi sosial masyarakat, budaya, dan tradisi, keadaan alam dan wilayah serta pengalaman sejarahnya.

Semenjak berabad-abad lalu, etnis Tionghoa berada di Indonesia dengan jumlah yang cukup besar. Tetapi, karena persoalan menyangkut etnis masih dianggap peka, sebelum tahun 2000, jumlah suku bangsa/etnis di Indonesia tidak pernah dimasukkan ke dalam sensus penduduk Republik Indonesia. Perhitungan jumlah etnik Tionghoa ditaksir berdasarkan sensus tahun 1930. Pada waktu itu, jumlah etnik Tionghoa hanya 1,2 juta, kira-kira 2,03% penduduk Indonesia. Menurut pendapat lain, jumlah etnik Tionghoa di antara 2,5% dan 3% atau bahkan lebih besar, yaitu berkisar antara 4-5%. Sensus 2000 tidak memberikan jumlah etnik Tionghoa yang lengkap.

Hasil perhitungan menunjukkan angka 1,7 juta, atau kira-kira 0,86%. Jika ditambah dengan etnik Tionghoa asing, jumlahnya kira-kira 1,8 juta, yaitu 0,91%. Tetapi menurut perhitungan berdasarkan sensus 2000, jumlah penduduk Tionghoa Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing (WNI dan WNA) kira-kira 3 juta orang, yaitu sekitar 1,5% (Suryadinata, Arifin, dan Ananta 2003). Jumlahnya lebih besar daripada sensus 1930, namun angka dalam persen lebih rendah dibandingkan sensus 1930. Menurunnya persentasi etnik Tionghoa mungkin disebabkan oleh tiga faktor utama: angka kelahiran yang menurun, imigrasi ke luar negeri akibat gejolak politik dan sosial, dan kebijakan asimilasi selama orde baru. Faktor yang terakhir ini ada hubungannya dengan tema khusus Antropologi Indonesia kali ini, yaitu kebijakan negara Indonesia terhadap minoritas etnik Tionghoa.

Leo Suryadinata membahas kebijakan pemerintah Indonesia menyangkut persoalan etnis Tionghoa dari masa ke masa, terutama masa orde baru dengan proyek kebijakan asimilasi dan masa pasca rezim pemerintahan Presiden Soeharto. Kebijakan ini ditandai dengan penghapusan pilar-pilar kebudayaan Tionghoa (termasuk penutupan sekolah Tionghoa, pembubaran organisasi etnik Tionghoa dan pemberedelan mass media Tionghoa) serta simbol-simbol dan adat-istiadat etnis Tionghoa. Dalam keadaan demikian, sejumlah orang Tionghoa telah dibaur dan tidak merasa sebagai Tionghoa lagi. Leo menegaskan bahwa kelompok etnis Tionghoa tidak lenyap dan jumlahnya masih sangat besar di Indonesia. Dengan berubahnya kebijakan pemerintah menjadi lebih akomodatif, kebangkitan identitas diri etnik Tionghoa bukan hal yang tidak mungkin.

Melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2002, tentang Penetapan Tahun Baru Imlek, tahun baru Imlek telah di akui sebagai salah satu hari besar nasional. Bahkan sejak pemerintahan Presiden Abdurrachman Wahid, warga Tionghoa memperoleh hak-hak yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya, disamping itu semakin pudarnya tabu perbedaan suku, ras dan agama.

Di dalam ruang demokrasi yang ada sekarang ini masih ada persoalan yang dirasakan masyarakat etnis Tionghoa, salah satunya yang penting adalah keterlibatan mereka di kancah politik. Beredar berbagai hipotesis tentang bentuk partisipasi politik kelompok masyarakat ini setelah selama zaman kepemimpinan Presiden Soeharto dipaksa agar selalu menjauhi politik, ada yang berpendapat bahwa etnis Tionghoa di Indonesia dan khususnya di Kota Pontianak Kalimantan Barat terutama yang

bergerak di bidang bisnis dan perdagangan, tetap ingin memihak ke partai besar dan yang sedang berkuasa, yaitu Partai Golongan Karya dan Partai Demokrat Indonesia Perjuangan, sementara pendapat lain mengatakan etnis Tionghoa memilih partai yang terbuka yang menjanjikan keberagaman. Ada juga keinginan sebagian etnis Tionghoa di Indonesia untuk membangun kekuatan politik sendiri atau partai politik sendiri, tetapi ada juga yang menganggap mereka apatis terhadap politik, keapatisan ini di buktikan bahwa di dalam lingkungan administrasi pemerintahan masih terdapat pemberlakuan diskriminatif terhadap komunitas warga negara Indonesia (WNI) Tionghoa/Cina, dalam kenyataannya memang pemerintah Kota tidak memberlakukan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SKBRI), namun masih banyak oknum yang mencari keuntungan dari hal itu. (Jawa Pos, 16/06/04).

Berkaitan dengan uraian di atas, jika selama pemilihan umum 1999, komunitas etnis Tionghoa masih tampak malu-malu dan agak canggung dalam berpolitik, namun di dalam pemilu 2004 partisipasi politik komunitas Tionghoa terlihat semakin dinamis dan asertif. Sebutan “ekonomi” dan “apolitis” adalah dua stigma populer yang sudah melekat bagi etnis Tionghoa, persepsi mayoritas elite politik Indonesia tampaknya masih berkutat di situ, karena menilai partisipasi warga etnis Tionghoa sebatas keuntungan ekonomis saja. Persepsi ini adalah buah dari asumsi yang tidak mendasar bahwa komunitas warga etnis Tionghoa yang hanya 2% dari populasi menguasai 70% perekonomian nasional. Citra kekuatan ekonomi komunitas etnis Tionghoa memang sudah ada sejauh sejarah kolonial, tetapi label 2% dan 70% menjadi kelihatan di akhir tahun 1990-an seiring krisis ekonomi yang

melanda Indonesia, dikarenakan tendensi bombastis sejumlah jurnalis masa lalu yang salah mengutip penelitian Michael Backman (1995), tentang kapitalisasi pasar 300 konglomerat Indonesia. Backman menemukan 73% total kapitalisasi pasar dimiliki oleh warga etnis Tionghoa. Akan tetapi kapitalisme bukan perekonomian nasional, kapitalisasi pasar tidak mengikutsertakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan asing dan multinasional, serta aspek lainnya yang berkontribusi lebih besar untuk perhitungan perekonomian nasional (Aditjondro, 2000).

Berkaitan dengan hal di atas tersebut, beberapa publikasi media sepanjang pemilu eksekutif dan legislatif telah mencatat beberapa perkembangan. Selama pemilu, dimana sejumlah media mencatat setidaknya 150 calon legeslatif Tionghoa, meskipun pada akhirnya hanya sebagian kecil yang berhasil mendapatkan kursi. Di berbagai daerah muncul berbagai kreasi partisipasi politik yang dulu terasa minim sekali, mulai dari peningkatan keanggotaan Partai politik, inisiatif debat/diskusi politik oleh asosiasi Tionghoa, kampanye partai politik, sampai sosialisasi proses pemilu. Di lihat selama kampanye pemilihan Presiden, terlihat kemunculan perbagai represintasi etnis Tionghoa baik untuk bersilahturahmi kepada Presiden Megawati Soekarno Putri maupun Presiden Susilo Bambang Yudoyono.

Tim sukses calon Presiden-pun bergerak dengan dinamika yang berbeda, tetapi relatif lebih asertif ketimbang masa-masa pemilu sebelumnya, penyelenggaraan diskusi publikpun meningkat intensitasnya. Bagi mereka yang merasa partisipasi politik Tionghoa tidak penting karena populasinya sedikit, mereka melupakan bahwa

jumlah mungkin memiliki makna yang cukup besar bagi perhitungan suara pemilu, tetapi memang kecil bagi proses demokratisasi secara komprehensif.

Terlepas dari kekurangan yang ada, perkembangan hingga pemilu 2004 cukup sesuai dengan harapan. Mayoritas warga masyarakat etnis Tionghoa akan memilih kandidat yang menjamin tidak ada atau lebih sedikit diskriminasi dan stabilitas ekonomi, agak sempit memang tetapi bisa dimengerti mengingat rekonstruksi mindset apolitis selama tiga dekade orde baru. Namun setelah runtuhnya rezim orde baru lebih dari enam tahun reformasi, argumen tersebut lama-lama akan luntur. Nantinya komunitas Tionghoa tidak lagi bisa bersembunyi dibalik argumen tersebut. Roda demokratisasi di Indonesia sedang berputar, pilihan harus dibuat dan tindakan harus diambil untuk memaknai eksistensi warga etnis Tionghoa di Indonesia.

Sejak reformasi politik digulirkan pada tahun 1998, sistem politik Indonesia telah membuka ruang bagi seluruh warga negara Indonesia untuk ikut serta dalam berpolitik, termasuk bagi warga negara keturunan etnis Tionghoa. Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis adalah merupakan pencerminan dari komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan, kepastian, dan kesamaan kedudukan didalam hukum pada semua warga negara untuk hidup bebas dari diskriminasi ras dan etnis. Negara menyadari bahwa memperlakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu

kesastraan di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Selain itu, tindakan diskriminasi berdasarkan atas ras dan etnis menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis. Padahal ras dan etnis itu bersifat *given* (memberi), yaitu suatu pemberian rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan tidak ada satupun makhluk yang dapat meminta atau memilih.

Kini negara tidak lagi mau lengah dan terhayut dalam trauma sejarah yang telah memberlakukan diskriminasi terhadap warga negara berdasarkan atas ras dan etnis. Sudah saatnya perlindungan terhadap warga negara dari segala bentuk tindakan diskriminatif berdasarkan atas ras dan etnis diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta masyarakat, dan melibatkan partisipasi seluruh warga negara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagi warga etnis Tionghoa, perubahan atmosfir politik dari otoritarian ke demokrasi yang memberikan kebebasan kepada warga negara untuk mengekspresikan gagasan, hak, dan kepentingan politik melalui kebijakan yang bersifat otoritatif yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, merupakan suatu berkah yang patut disyukuri, diperjuangkan serta dipertahankan. Untuk itu perlu ada benteng yang kuat untuk berpartisipasi aktif dalam bidang politik dan Pemerintahan. Inilah saatnya untuk melibatkan diri dalam aktivitas politik mulai dari ranah lokal maupun nasional, melalui sarana partai politik dan pemilihan umum untuk menunjukkan rasa komitmen kebangsaan yang tinggi sebagai warga negara Indonesia.

Orientasi politik dan kesadaran berbangsa warga negara etnis Tionghoa secara perlahan semakin berkembang, tidak hanya dalam hal pengurusan identitas kewarganegaraan yang sifatnya pasif tetapi juga dalam bidang pemerintahan, khususnya keterlibatan dalam partai politik. Sebelumnya dimasa pemerintahan orde baru, bagi warga negara keturunan etnis Tionghoa tidak tersedia ruang untuk berpartisipasi dalam politik. Apalagi pada masa itu, pengakuan terhadap kewarganegaraan mereka pun masih setengah hati dengan pemberlakuan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SKBRI) yang cukup ketat oleh pemerintah.

Orientasi politik warga negara etnis Tionghoa terhadap politik cenderung apatis, karena “pengakuan” terhadap eksistensi mereka sebagai warga negara Indonesia masih belum jelas. Di sisi lain, warga etnis Tionghoa sebelum bergulirnya reformasi cenderung takut (*underpressure*) apabila melibatkan diri dalam berpolitik karena keterkaitan sejarah hubungan RRC dan RI saat ideologi komunis berkembang di Indonesia. Kalimantan Barat, khususnya Kota Pontianak adalah daerah yang populasi etnis Tionghoa cukup besar atau urutan kedua setelah etnis melayu yang merupakan etnis asli Kota Pontianak. Selama ini aktivitas warga etnis Tionghoa lebih fokus pada kegiatan perdagangan (ekonomi). Hampir semua sektor perdagangan di Kalimantan Barat, khususnya di Kota Pontianak boleh dikatakan “dikuasai” oleh warga etnis Tionghoa. Namun kini, sejak pemilu legislatif Tahun 2004 dan Tahun 2009 ini, kesadaran warga negara etnis Tionghoa dalam kegiatan politik semakin meningkat, seiring dengan dihapuskannya kebijakan tentang status kewarganegaraan mereka.

Warga negara etnis Tionghoa mengetahui dan menyadari bahwa pengekangan terhadap kebebasan menentukan haluan politik (*political right*) adalah sebuah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Di sisi haluan orientasi terhadap kebangsaan adalah suatu kewajiban sekaligus hak yang tidak dapat dibatasi oleh agama, geografis, status sosial, status ekonomi, ideologi politik, dan etnisitas.

Di bawah kepemimpinan Presiden Abdurrachman Wahid dan dilanjutkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, warga negara etnis Tionghoa semakin mendapatkan perhatian dari negara yang menyebabkan mereka semakin “percaya diri” bahwa tidak ada lagi diskriminasi dalam hal hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sebagai pembuktian dari kepercayaan diri warga negara etnis Tionghoa tersebut, dalam beberapa kali pemilu, baik pemilu legislatif maupun pemilu kepala daerah dan wakil daerah provinsi dan kabupaten/kota, selalu saja ada kompetitor dari kalangan etnis Tionghoa. Bahkan di antaranya ada yang berhasil sebagai pemenang, seperti Walikota Singkawang, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak.

Data dari Sekretariat DPRD Kota Pontianak menunjukkan bahwa hasil pemilu 2004 terdapat 4 (empat) orang warga etnis Tionghoa yang terpilih sebagai anggota DPRD Kota Pontianak yang berasal dari etnis Tionghoa. Pada pemilu 2009 meningkat menjadi 8 (delapan) orang yang berasal dari partai politik yang berbeda. Tentu bukan tanpa alasan, keterlibatan dan partisipasi warga negara etnis Tionghoa di bidang pemerintahan, khususnya aktivitas mereka dalam suatu partai politik yang dapat menghantarkan mereka ke lembaga perwakilan rakyat menjadi tujuan utama.

Dari sisi ilmu kewarganegaraan, tentunya aktivitas mereka dalam kancah politik di ranah lokal, antara lain disebabkan perubahan orientasi politik dalam penguatan komitmen kebangsaan yang semakin meningkat. Hal ini sangat erat kaitannya dengan pemahaman wawasan kebangsaan bagi setiap warga negara, di mana masalah negara dan wawasan kebangsaan adalah masalah visi, misi, dan tujuan, sebab tanpa ketiganya tidak ada bangsa yang sanggup bertahan dan menjadi bangsa besar di muka bumi ini.

Berangkat dari perkembangan kesadaran politik warga masyarakat etnis Tionghoa yang cukup tinggi sebagaimana dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang orientasi politik masyarakat etnis Tionghoa Kota Pontianak dalam penguatan komitmen kebangsaan, khususnya di Kota Pontianak.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi masalah umum penelitian yakni: Bagaimana orientasi politik masyarakat etnis Tionghoa dalam penguatan komitmen kebangsaan secara rinci? Berdasarkan masalah penelitian di atas tersebut, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana orientasi politik masyarakat etnis Tionghoa di Kota Pontianak dalam penguatan komitmen kebangsaan?
2. Bagaimana strategi masyarakat etnis Tionghoa dalam melakukan aktivitas politik di Kota Pontianak?

3. Bagaimana peran aktor politik masyarakat etnis Tionghoa dalam melakukan aktivitas politik di Kota Pontianak?
4. Faktor apakah yang mendorong tumbuh dan meluasnya tingkat orientasi politik masyarakat etnis Tionghoa di Kota Pontianak dalam penguatan komitmen kebangsaan?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian bertujuan untuk memperoleh gambaran dan melakukan pengkajian, menggali, menganalisis tentang bagaimana orientasi politik etnis Tionghoa dalam penguatan komitmen kebangsaan. Secara khusus penelitian ini untuk mengetahui tentang :

1. Orientasi politik masyarakat etnis Tionghoa di Kota Pontianak dalam penguatan komitmen kebangsaan.
2. Strategi warga etnis Tionghoa dalam melakukan aktivitas politik di Kota Pontianak.
3. Peran aktor politik warga etnis Tionghoa dalam melakukan aktivitas politik di Kota Pontianak.
4. Faktor yang mendorong tumbuh dan meluasnya tingkat orientasi politik masyarakat etnis Tionghoa dalam penguatan komitmen kebangsaan di Kota Pontianak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan manfaat baik secara keilmuan (teoritik) maupun secara empirik (praktis). Secara teoritik penelitian ini akan mengkaji sejauh mana tingkat orientasi politik masyarakat etnis Tionghoa Kota Pontianak dalam penguatan komitmen kebangsaan. Dari temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi beberapa pihak sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Para akademis atau komunitas akademik, khususnya dalam bidang pendidikan kewarganegaraan sebagai bahan kontribusi ke arah sejauh mana keterlibatan warga negara etnis Tionghoa pada orientasi politik etnis Tionghoa dalam penguatan komitmen kebangsaan di Kota Pontianak Kalimantan Barat khususnya.
2. Bagi warga negara etnis Tionghoa hendaknya lebih memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan yang telah diberikan oleh pemerintah untuk terlibat dalam kegiatan politik khususnya di Kota Pontianak Kalimantan Barat.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pemerintah maupun partai politik agar senantiasa memberikan pendidikan politik khususnya kepada pemilih pemula sehingga perilaku politik dari pemilih pemula didasarkan atas orientasi yang jelas dan rasional.

E. Keterbatasan Penelitian

Sebagaimana hasil laporan penelitian studi kasus yang dilakukan masih ada sisi kekurangan dan kelemahannya, oleh karena itu perlu penelitian selanjutnya, baik oleh peneliti sendiri maupun peneliti lainnya.

F. Definisi Konseptual

Dalam judul penelitian ini, terdapat beberapa lima konsep utama yakni; pendidikan kewarganegaraan, orientasi politik, masyarakat, aktor politik, nasionalisme-kebangsaan.

1. Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan (*citizenship education*) adalah pendidikan yang memfokuskan pada pembentukan sikap, perilaku, dan moral tentang beragam segi kehidupan warga negara meliputi segi agama, sosio-kultural bahasa, suku, bangsa serta wawasan nasional dan kebangsaan agar setiap orang dapat menjadi warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarater sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Depdiknas, 2003:7).

2. Orientasi Politik

Orientasi politik adalah persepsi, pola sikap, dan budaya politik seseorang atau kelompok masyarakat terhadap berbagai masalah politik dan peristiwa politik serta pembentukan struktur dan proses kegiatan politik masyarakat maupun pemerintahan. Orientasi politik tersebut menyangkut tingkat pengetahuan, perasaan, keterlibatan, dan

penolakkan, serta penilaian terhadap obyek kekuasaan aturan dan wewenang dalam sistem politik dan Pemerintahan yang sedang berlangsung.

Politik itu sendiri bisa dikatakan cerdas, dan bijaksana yang dalam pembicaraan sehari-hari kita seakan-akan mengartikan sebagai suatu cara yang dipakai untuk mewujudkan tujuan (Syafie dan Azhari 2009:6). Sementara itu Almod dan Verba (2009:16), mendefinisikan orientasi politik juga dapat dikatakan sebagai budaya politik dimana sebagai suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada di dalam sistem itu.

Dengan kata lain, bagaimana distribusi pola-pola orientasi khusus menuju politik di antara masyarakat itu bangsa itu, mereka menyatakan bahwa warga negara senantiasa mengidentifikasikan diri mereka dengan simbol-simbol dan lembaga kenegaraan berdasarkan orientasi yang mereka miliki, dengan orientasi itu pula mereka memiliki serta mempertanyakan tempat dan peranan mereka di dalam sistem politik. Selanjutnya menurut Almod. (1966:16), budaya politik adalah pola sikap dan orientasi individu terhadap politik di antara anggota sistem politik. Orientasi individu itu memiliki sejumlah komponen yakni:

- a. Orientasi kognitif, meliputi aspek pengetahuan, dan keyakinan
- b. Orientasi afektif, meliputi aspek perasaan terkait, keterlibatan, penolakkan, dan sejenisnya tentang obyek politik
- c. Orientasi evaluasi, meliputi aspek penilaian dan opini tentang objek politik yang biasanya melibatkan nilai-nilai terhadap obyek politik dan kejadian-kejadian.

Dari beberapa komponen di atas dapat diartikan orientasi individu terhadap obyek politik dapat dipandang dari tiga hal itu. Oleh karena itu individu memiliki tingkat

akurasi tinggi terhadap cara kerja sistem politik, siapa pemimpinnya, dan masalah-masalah dari kebijakan nya. Inilah yang di sebut dimensi kognitif.

Namun mereka mungkin memiliki alinasi atau penolakkan terhadap sistem. Bisa saja faktor keluarga atau sahabatnya sudah punya sikap seperti itu. Atau mungkin saja ia tidak merespon tuntutan terhadapnya oleh sistem. Itulah yang disebut dimensi afketif. Akhimya mungkin memiliki penilaian moral terhadap sistem. Barangkali norma-norma etiknya mendorong dia mengecam tingkat korupsi dan nepotisme. Dimensi-dimensi ini saling berkaitan dan mungkin memiliki kombinasi dalam berbagai cara, inilah yang disebut dimensi evaluasi.

3. Masyarakat

Menelaah kehidupan masyarakat sebagai sistem sosial dan sistem budaya, maka terlebih dahulu kita perlu mengkaji pengertian masyarakat dan budaya agar dapat memperoleh suatu gambaran awal. Dalam sehari-hari, orang tidak mungkin tidak berurusan dengan hasil-hasil kebudayaan. Setiap orang melihat, mempergunakan, bahkan terkadang merusak kebudayaan. Masyarakat adalah orang atau manusia yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan, keduanya tak dapat pisahkan dan selamanya merupakan dwitunggal, tak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan dan sebaliknya, tak ada kebudayaan tanpa masyarakat sebagai wadah dan pendukungnya walaupun secara teoritis dan kepentingan analitis pengertian kedua istilah tersebut dapat dibedakan dan dipelajari secara terpisah (Jacobus Ranjabar, 200:6). Pertanyaan yang tepat untuk itu adalah apakah masyarakat itu? perkataan masyarakat agraria, masyarakat kota,

masyarakat petani, masyarakat agama, dan sebagainya. Kata masyarakat juga dipergunakan untuk keperluan tertentu.

Dalam pengertian sosiologi, masyarakat tidak dipandang sebagai suatu kumpulan individu atau sebagai penjumlahan dari individu-individu semata. Masyarakat merupakan suatu pergaulan hidup. Definisi masyarakat (*society*), misalnya seperti berikut ini: Mac Iver dan Page (dalam Jacobus Ranjabar, 2006:10) yang mengatakan bahwa masyarakat ialah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan penggolongan, dari pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan mampu menjalankan tugasnya untuk mengorganisasikan dan mengintegrasikan kegiatan rakyatnya dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Sebagaimana dikatakan Laski dalam Miriam Budiarjo (2005), masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama dan berkerja sama untuk mencapai keinginan-keinginan mereka bersama (*a society is a group of human beings living together and working together for the satisfaction of their mutual wants*). Oleh karena itu dibutuhkan hubungan yang sinergis antara pemerintah dan masyarakat agar tujuan-tujuan dari pembangunan bisa tercapai. Hubungan tersebut dapat dijalankan melalui koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi yang baik. Sehingga program dan kegiatan antara pemerintah pusat dan lokal, atau pemerintah lokal dengan masyarakat tidak tumpang tindih atau berseberangan.

4. Aktor politik

Aktor politik adalah orang atau lembaga yang memiliki pengaruh dan kekuasaan dalam memainkan peran untuk mempengaruhi proses berlangsungnya kegiatan politik dan

pemerintahan sesuai dengan kapasitas masing-masing (Siti Zuhro, 2009). Peran aktor atau elite politik lokal pada dasarnya sangat berpengaruh pada kelangsungan birokrasi daerah tersebut. Selain itu peran-peran aktor tersebut sangat berpengaruh pada dinamika politik dan penguatan politik lokal. Namun sebenarnya hal itu bisa dimanfaatkan untuk percepatan demokrasi jika para aktor tersebut serius dalam menjalankan roda kepengurusan birokrasi.

Oleh karena itu, peran aktor sangat menentukan demokratisasi, ada kalanya bisa mendukung proses demokratisasi, namun adakalanya justru malah menghambatnya. Itu semua kembali dan tergantung bagaimana peran para aktor tersebut. Pada era orde baru, para aktor lokal tidak mampu berperan banyak karena sentralisasi ke-pemerintahan yang hanya terfokus pada pemerintah nasional Presiden Soeharto. Sementara itu pakar aktor cukup “diam di tempat” dan menunggu perintah dari otoritas pemerintah nasional (pusat). Sentralisasi seperti itu sebenarnya sangat menghambat proses deokratisasi. Apalagi pada era kepemimpinan Presiden Soeharto semuanya berasal dari pemerintah pusat dan seolah-olah absolut. Setelah gerbang reformasi terbuka pada 21 Mei 1998, pada saat itu Presiden Soeharto menyatakan pengunduran dirinya. Runtuh sudah otoritas ke- pemerintahan orde baru, dan mulailah perombakan-perombakan pada politik dan birokrasi kenegaraan. Perubahan-perubahanpun terjadi disana-sini, Sentralisasi ke-pemerintahanpun bergeser pada desentralisasi. Oleh karena itu, aktor lokalpun mulai menampakkan aksi dan perannya di kancah politik lokal.

Pasca orde baru peran aktor lokal semakin kentara, hal ini tampak pada gejala-gejala politiknya, salah satunya dalah pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah yang pada dasarnya bertujuan untuk mempermudah layanan publik dan percepatan demokratisasi

banyak dilakukan oleh daerah-daerah yang mempunyai aktor lokal kuat. Namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa ternyata aksi pemekaran daerah tersebut ada kalanya ditumpangi oleh kepentingan politik dengan tujuan-tujuan pragmatis yang mendominasi.

5. Nasionalisme-Kebangsaan

Adalah suatu keadaan jiwa yang berupa keinsyafan dan kesadaran berbangsa sebagai suatu bangsa yang lahir secara alamiah karena kesamaan sejarah, kebersamaan kepentingan, rasa senasib, dan sepenanggungan dalam menghadapi masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Nasionalisme-kebangsaan juga diwarnai dengan kesamaan pandangan, harapan, tujuan, budaya, bahasa, cita-cita dan kecintaan kepada tanah air yang dapat mempekat jati diri untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara. Senada dengan apa yang disampaikan oleh Poespawardojo, (1995:116), nasionalisme adalah faham kebangsaan yang menyatakan loyalitas tertinggi terhadap masalah-masalah duniawi dari setiap negara yang ditujukan kepada negara dan bangsa.

Berkaitan dengan hal di atas, maka kebangsaan atau nasionalisme lebih menitik beratkan kepada keadaan jiwa yang berupa keinsyafan dan kesadaran berbangsa sebagai suatu bangsa yang lahir secara alamiah karena kesamaan sejarah, kebersamaan kepentingan, rasa senasib dan sepenanggungan dalam menghadapi masa lalu, kini dan yang akan datang. Nasionalisme-kebangsaan berkaitan dengan apa yang dinamakan wawasan kebangsaan pada setiap warga negara Indonesia, karna di dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), makna dan hakekat serta wawasan kebangsaan tersebut sangat penting untuk dipahami oleh setiap warga negara Indonesia. Dengan kata lain wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai sudut pandang suatu bangsa dalam memahami

keberadaan jati diri dan lingkungannya pada dasarnya merupakan penjabaran dari filsafah bangsa itu sesuai dengan keadaan wilayah suatu negara dan sejahtera yang dialaminya. Wawasan kebangsaan inilah yang menentukan cara pandang bangsa memanfaatkan kondisi geografis, sejarah, sosial-budayanya dalam mencapai cita-cita dan menjamin kepentingan nasionalnya serta bagaimana bangsa itu memandang diri dan lingkungannya baik ke dalam maupun lingkungan yang lebih luas lagi.

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan dan metode Penelitian

Metodologi adalah proses, prinsip-prinsip dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati masalah dan mencari jawaban. Mendasarkan diri pada pengertian ini, pada rencana penelitian tesis yang hendak dilakukan oleh penulis pendekatan yang digunakan kualitatif. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Creswell (1998), mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai berikut.

Qualitative research is an inquiry process of understanding based on distinct methodological traditions of inquiry that explore a social or human problem. The researcher builds a complex, holistic picture, analyses words, reports detailed views of informants, and conducts the study in a natural setting.

Kutipan di atas dapat dijelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah proses penelitian untuk memahami berdasarkan tradisi metodologi penelitian tertentu dengan cara menyelidiki masalah sosial atau manusia. Peneliti membuat gambaran kompleks bersifat holistik, menganalisis kata-kata, melaporkan pandangan-pandangan para informan secara rinci, dan melakukan penelitian dalam situasi alamiah.

Penelitian kualitatif menurut Nasution (1996:18), disebut juga dengan penelitian naturalistik. Disebut kualitatif karena sifat dan data yang dikumpulkan bercorak kualitatif, bukan kuantitatif, karena tidak menggunakan alat-alat pengukur. Disebut naturalistik karena situasi lapangan penelitian bersifat natural atau wajar, sebagaimana adanya, tanpa dimanipulasi, diatur dengan eksperimen atau tes.

Oleh karena data yang hendak diperoleh dari rencana penelitian tesis bersifat kualitatif berupa deskripsi analitik tentang suatu peristiwa yang diambil dari situasi yang wajar, maka dibutuhkan ketelitian dari peneliti untuk dapat mengamati secermat mungkin aspek-aspek yang diteliti, dari hal tersebut terlihat disini bahwa peranan peneliti sangat menentukan sebagai alat penelitian utama (*key instrumen*) yang mengadakan sendiri pengamatan atau wawancara berstruktur. Dalam kaitan ini Nasution, (1996:9), berpendapat bahwa:

Hanya manusia sebagai instrumen dapat memahami makna interaksi antar manusia, membaca gerak muka, menyelami perasaan dan nilai yang terkandung dalam ucapan atau perbuatan responden. Walaupun digunakan alat rekam atau kamera peneliti tetap memegang peran utama sebagai alat penelitian.

Begitu pula dalam rencana penelitian tesis, penulis sebagai instrumen utama yang berusaha mengungkapkan data secara mendalam dengan dibantu oleh beberapa teknik pengumpulan data. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Moleong, (2005:9), bahwa :

Bagi peneliti kualitatif manusia adalah instrumen utama, karena ia menjadi segala dari keseluruhan penelitian. Ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana, pengumpul data, analisis, penafsir, dan pada akhirnya ia menjadi pelopor penelitiannya.

Disamping menekankan pada faktor peneliti sebagai alat penelitian utama, rencana penelitian tesis inipun memperhatikan pula metode yang digunakan agar hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Penelitian kualitatif dengan metode studi kasus dimaksudkan untuk mengungkapkan dan memahami kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus akan lebih luas dan mendalam mengungkapkan kajian tentang orientasi politik masyarakat etnis Tionghoa di Kota Pontianak dalam penguatan komitmen kebangsaan. Menurut S. Nasution, (1996:55):

Studi kasus atau case study adalah untuk penelitian yang mendalam tentang suatu aspek lingkungan sosial termasuk manusia di dalamnya. Case study dapat dilakukan terhadap seorang individu, kelompok atau suatu golongan manusia, lingkungan hidup manusia atau lembaga sosial.

Sedangkan Menurut Maxfield (dalam Nazir, 1983:66) studi kasus atau case study adalah:

Penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Yang subjek penelitiannya dapat berupa individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat. Sehingga dapat memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus, yang kemudian dari sifat-sifat khas di atas akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum.